



# RENCANA STRATEGIS

# 2024 2026



## DINAS PERTANIAN KOTA BIMA

Jalan Soekarno-Hatta No. 2 Raba Bima - NTB

e-mail: [dispertannakkobi@gmail.com](mailto:dispertannakkobi@gmail.com)

Website : [pertanian.bimakota.go.id](http://pertanian.bimakota.go.id)

Telp. 0374-44085 Fax. 0374-44085

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Bima periode 2024-2026 telah selesai disusun, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Bima periode 2024-2026 ini disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra Dinas Pertanian Kota Bima disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bima Tahun 2024-2026 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan visi misi Kota Bima sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMD 2024-2026.

Pimpinan dan seluruh karyawan Dinas Pertanian Kota Bima memiliki konsekuensi untuk melaksanakan Renstra ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dalam mewujudkan pencapaian visi Pemerintah Kota Bima yaitu *mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri* melalui misi *mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan*, yang akan dilakukan evaluasi pencapaiannya setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Renstra sebagai dokumen perencanaan memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana disebutkan diatas tergantung pada komitmen segenap karyawan Dinas Pertanian Kota Bima untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Pertanian Kota Bima yang lebih baik.

Kota Bima, Mei 2023

PLT. Kepala Dinas,

**M. ADZAN SABIL, SP.**  
NIP. 196809052003121009

# DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN .....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Landasan Hukum .....	4
1.3.	Maksud dan Tujuan .....	10
1.4.	Sistematika Penulisan .....	11
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	13
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	13
2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah .....	23
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	40
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	66
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	69
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	72
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	75
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis .....	83
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN .....	84
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	84
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	86
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	89
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	104
BAB VIII.	P E N U T U P .....	105

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Keadaan Pegawai Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan Kota Bima Tahun 2023 .....	23
Tabel 2	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Pangkat .....	23
Tabel 3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	24
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima .....	26
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan ( <i>Sebelum Pemberlakuan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</i> ) .....	27
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan ( <i>Sebelum Pemberlakuan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</i> ) .....	49
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan ( <i>Sesudah Pemberlakuan Permengri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</i> ) .....	33
Tabel 7	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Bima .....	66
Tabel 8	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	69
Tabel 9	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian berdasarkan Sasaran Renstra SKPD beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	72
Tabel 10	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	79
Tabel 11	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima .....	85
Tabel 12	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kota Bima .....	86
Tabel 13	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kota Bima .....	96
Tabel 14	Indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Bima Tahun yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2024-2026 .....	104

# DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bima .....	22
--	----



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2023 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018–2023 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023. Berkaitan dengan hal tersebut, masa transisi menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, tetap memerlukan perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi penjabat kepala daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Bagi Daerah Otonomi Baru.

Dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada tanggal 26 September 2023, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima bersama perangkat daerah lainnya telah membentuk tim dalam menyiapkan dan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama (3) tiga tahun kedepan.

Berdasarkan Inmendagri 52 Tahun 2022, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPD Kota Bima, yaitu sinergitas perencanaan Pusat dan Daerah dengan memperhatikan pendekatan penyalarsan target indikator makro dan program prioritas



Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Bima sampai dengan Tahun 2026, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018–2023, RPD Provinsi, isu-isu strategi yang berkembang dan kebijakan Nasional dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, dalam penyusunan program dalam RPD harus memperhatikan beberapa hal antara lain: Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi, evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (*outcome*), isu-isu strategis terkait bidang urusan dan tupoksi perangkat daerah, standar pelayanan minimum, serta usulan program dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah maupun program pembangunan daerah yang bersebelahan. Penyusunan RPD Kota Bima juga tidak terlepas dari telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Walaupun dalam masa transisi penyusunan Perencanaan Strategik ini tetap merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Potensi tersebut menghasilkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang merupakan acuan dan tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) tahunan selama rentang waktu masa transisi 2024-2026. RPD merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) tahun kedepan.



Berdasarkan visi Pemerintah Kota Bima “**Mewujudkan Kota Bima Yang SEJAHTERA, MAJU dan MANDIRI pada Tahun 2028**” terutama di Misi ke 2 “***Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan***”, maka arah kebijakan pembangunan Kota Bima dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan khususnya pada sektor pertanian adalah Peningkatan Potensi Produk Unggulan Daerah pada Sektor Pertanian Guna Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peternak.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional peranan sektor pertanian cukup strategis dan memiliki kaitan kuat di sektor hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta antara lain karena berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi yang dapat membawa perubahan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dalam pemulihan ekonomi masyarakat, pemenuhan bahan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan pembangunan nasional disektor pertanian difokuskan pada lima program utama, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Kelima program utama tersebut diarahkan untuk: (1) Meningkatkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman bahan pangan dan kelembagaan pangan yang bersumber pada budaya lokal; (2) Mengembangkan sistem agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumber daya manusia; serta (3) Meningkatkan kesejahteraan





petani melalui peningkatan penguatan modal dan peningkatan pendapatan.

Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis, yaitu keseluruhan kinerja sistem usaha yang saling terkait, saling bergantung dan saling mempengaruhi mulai dari sub sistem hulu, sub sistem usaha tani (*off farm*), sub sistem hilir (*on farm*) dan sub sistem penunjang yang dikembangkan secara simultan, serasi dan seimbang.

Pengembangan sistem agribisnis cukup penting menyangkut beberapa korelasi sebagai berikut :

1. Pondasi dasar sistem agribisnis belum kokoh, sehingga belum berkembang seperti yang diharapkan;
2. Pendapatan petani masih rendah, baik secara nominal maupun secara relatif dibandingkan sektor lain. Produksi riil tenaga kerja di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain;
3. Terjadi kesenjangan produktivitas dan mutu yang cukup besar sehingga daya saing produk pertanian masih berpeluang untuk ditingkatkan;
4. Lemahnya kelembagaan usaha tani dan perkembangan kemitraan yang saling menguntungkan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategik Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
28. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
29. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);
  39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
  40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor xxx);
44. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
45. Peraturan Walikota Bima Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rentra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024–2026 adalah sebagai salah satu upaya merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis serta perumusan program dan kegiatan pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sesuai dengan sumber-sumber pendanaan yang dimanfaatkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategik Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dokumen sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan selama tiga tahun ke depan (tahun 2024 sampai dengan tahun 2026), dan sebagai



bahan informasi bagi instansi terkait lainnya dalam merumuskan program-program pembangunan secara terpadu antara instansi di pusat, propinsi dan kabupaten/kota;

- 2) Menyediakan suatu tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahun.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistimatika penulisan RENSTRA Dinas Pertanian Kota Bima adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis





**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. P E N U T U P**



## **BAB** 2

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi (Perwali No. 77 Tahun 2021)**

1. a. Dinas Pertanian Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian.
- b. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
  2. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
  3. Pengembangan prasarana pertanian;
  4. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  5. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  6. Pembinaan produksi dibidang pertanian;
  7. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
  8. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
  10. Pemberian rekomendasi ijin usaha teknis pertanian;
  11. Pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian;
  12. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan



13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bima sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
2. a. **Sekretariat** mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
  2. Pengelolaan urusan keuangan;
  3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
  4. Pengelolaan urusan ASN; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1. Sub Bagian Umum
  - A. Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
    - a. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
    - b. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
    - c. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
    - d. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
    - e. Melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup dinas; dan
    - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris.



melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.

3. a. **Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  6. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  7. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  8. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan



9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. a. **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan mempunyai fungsi:
1. Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
  2. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  3. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  5. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;



6. Pengawasan obat hewan;
  7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  8. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
  9. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  10. Pemberian rekomendasi izin di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  11. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  12. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. a. **Bidang Perkebunan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.



- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
  3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
  4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
  5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
  6. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
  7. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  8. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang perkebunan;
  9. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perkebunan membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berada di bawah dan bertanggung jawab



serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Perkebunan.

6. a. **Bidang Penyuluhan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
  2. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
  3. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  4. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
  5. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  6. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
  7. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Penyuluhan membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berada di bawah dan bertanggung jawab





serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

7. a **Bidang Prasarana dan Sarana**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
  - b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
  - c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  - e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  - f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.



8. a. **Unit Pelaksana Teknis**, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- b. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pertanian.

#### 2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bima (berdasarkan Perwali Kota Bima Nomor 77 tahun 2021) terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
  1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  2. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  3. Bidang Perkebunan dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perkebunan.
  4. Bidang Penyuluhan dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penyuluhan.
  5. Bidang Prasarana dan Sarana dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Prasarana dan Sarana.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :




LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 77 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKTA TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ABD. WAHAB, SH  
NIP. 19650903 1998031 005

WALIKOTA BIMA,  
ttd  
MUHAMMAD LUTFI



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur;

Sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun 2023

No	URAIAN	Jumlah Pegawai Berdasarkan										Ket
		Jenis Kelamin			Pendidikan							
		L	P	JM	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	
1	PNS	43	51	94	2	65	5	11	11	-	-	
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Honor K2	7	4	11	-	1	-	1	8	1	-	
4	THL	6	8	14	-	3	-	1	10	-	-	
	THL DRH/D3	1	1	2	-	1		1	-	-		
5	PMT	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
6	Tenaga Kontrak	8	3	11	-	3	-	-	3	2	3	
Jumlah		66	67	133	2	74	5	14	32	3	3	

Tabel 2. Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Pangkat

No.	Pangkat/golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama , IV/c	1	
2.	Pembina Tk. I, IV/b	-	
3.	Pembina, IV/a	6	
4.	Penata Tk. I, III/d	45	
5.	Penata, III/c	15	
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	14	
7.	Penata Muda, III/a	6	
8.	Pengatur Tk. I, II/d	-	
9.	Pengatur, II/c	2	
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	-	
11.	Pengatur Muda, II/a	5	
12.	Honerer K2	11	
13.	THL + PMT	17	
14.	Tenaga Kontrak Daerah	11	
Jumlah		133	



Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Esselon II/b	1	
2.	Esselon III/a	1	
3.	Esselon III/b	5	
4.	Esselon IV	13	
5.	Fungsional	33	
6.	Staf	33	
7.	THL PPL/DRH./PMT	17	
8.	Staf Non PNS	22	
	<b>J u m l a h</b>	<b>133</b>	

#### 2.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

##### **Sarana**

- Kendaraan dinas : Roda 4 : 3 unit  
Roda 3 : 1 unit  
Roda 2 : 81 unit
- Perlengkapan kantor : Meubelair dan Peralatan Elektronik

##### **Prasarana**

- Kantor dinas : 1 unit
- Kantor Puskesmas : 2 unit
- Kantor Unit Pelayanan IB : 1 unit
- Kantor BPP : 4 unit
- Gedung Rumah Potong Hewan : 1 unit
- Pasar Hewan : 1 unit
- Kebun bibit : 1,2 Ha

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan sasaran/target renstra periode 2018-2023 dan indikator pelayanan dapat dilihat pada tabel 4, sedangkan anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 5.

Pada Tabel 4. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima, dapat dilihat bahwa Produksi Pertanian Tanaman Pangan secara totalitas realisasi produksi terus mengalami peningkatan, namun ada



kecenderungan pada komoditi lain selain jagung mengalami penurunan yang diakibatkan oleh tingginya animo masyarakat dalam membudidayakan komoditas tersebut, yang dikarenakan oleh prospek pasar yang sangat baik ketimbang komoditi lainnya. Sementara untuk komoditi perkebunan realisasi produksinya relatif stabil, hanya saja untuk tanaman tembakau mengalami penurunan yang diakibatkan oleh musim yang tidak mendukung. Untuk komoditi peternakan, secara totalitas realisasi produksinya juga relatif stabil, hanya saja untuk realisasi produksi daging sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pemasukan daging dari luar Kota Bima.



Tabel 4. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima

Indikator Tujuan	Target Kinerja					Produksi Peternakan	2018			2019			2020			2021			2022										
	2019	2020	2021	2022	2023		Produksi			% Pertumbuhan		Produksi			% Pertumbuhan		Produksi			% Pertumbuhan									
							Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	%Real.	%Capaian	Target	Realisasi	Capaian	%Real.	%Capaian	Target	Realisasi	Capaian	%Real.	%Capaian					
Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan	1,25	1,45	1,65	1,85	2,05	Daging	1.500,12	1.517,17		1.527,17	1.547,17	101,31	1,98	1,95	1.549,26	1.574,22	101,61	1,75	1,72	1.574,22	1.604,78	101,94	1,94	1,90	1.611,78	1.643,07	101,94	2,39	2,34
						Kulit	100,87	102,02		101,03	102,06	101,02	0,04	0,04	102,06	103,68	101,59	1,59	1,57	103,68	105,65	101,90	1,90	1,86	105,65	108,01	102,23	2,23	2,18
						Telur	870,00	879,89		879,89	891,76	101,35	1,35	1,33	891,76	906,30	101,63	1,63	1,60	906,30	923,70	101,92	1,92	1,88	923,70	943,65	102,16	2,16	2,11
	J U M L A H						2.470,99	2.499,07	101,14	2.508,08	2.540,99	101,31	1,68	0,17	2.543,08	2.584,20	101,62	1,70	1,67	2.584,20	2.634,13	305,76	1,93	0,63	2.641,13	2.694,73	102,03	2,30	2,23
% Proyeksi Realisasi	1,14%	1,32%	1,61%	1,94%	2,31%																								
Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	2,87	4,22	5,57	6,92	8,27	Padi (GKP)	28.728,00	29.477,54		29.497,54	30.462,11	103,27	3,34	3,23	30.462,11	31.811,58	104,43	4,43	4,24	31.911,58	33.874,14	106,15	6,48	6,11	33.874,14	36.804,26	108,65	8,65	7,96
						Jagung (PK)	30.835,00	31.639,51		32.199,51	33.332,94	103,52	5,35	5,17	33.382,94	34.948,22	104,69	4,85	4,63	35.198,22	37.574,11	106,75	7,51	7,04	37.374,11	40.621,91	108,69	8,11	7,46
						Kedelai (BK)	195,00	200,09		200,09	206,51	103,21	3,21	3,11	206,51	215,02	104,12	4,12	3,96	215,02	229,06	106,53	6,53	6,13	229,06	248,35	108,42	8,42	7,77
						Kacang Tanah (BK)	528,00	541,78		541,78	558,84	103,15	3,15	3,05	558,84	582,98	104,32	4,32	4,14	583,12	619,91	106,31	6,33	5,96	619,91	671,43	108,31	8,31	7,67
						Kacang Hijau (BK)	15,00	15,39		15,39	15,90	103,32	3,32	3,21	15,90	16,56	104,16	4,16	3,99	17,32	18,38	106,11	10,95	10,32	18,38	19,87	108,12	8,12	7,51
						Ubi Jalar (UB)	3.419,00	3.508,20		3.508,20	3.625,38	103,34	3,34	3,23	3.625,38	3.774,38	104,11	4,11	3,95	3.774,38	4.001,60	106,02	6,02	5,68	4.001,60	4.330,53	108,22	8,22	7,60
						Ubi Kayu (UB)	122,00	125,18		125,18	129,50	103,45	3,45	3,33	129,50	135,01	104,25	4,25	4,08	135,01	143,52	106,31	6,31	5,94	143,52	155,16	108,11	8,11	7,50
	J U M L A H						63.842,00	65.597,70	102,61	66.087,70	68.331,18	103,39	4,31	4,17	68.381,18	71.483,76	104,54	4,61	4,41	71.834,65	76.460,72	106,44	6,96	6,54	76.260,72	82.851,51	108,64	8,36	7,69
% Proyeksi Realisasi	2,61%	3,02%	4,69%	6,55%	8,65%																								
Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan	2,17	2,27	2,47	2,67	2,87	Tembakau	0,81	0,83		0,83	0,84	102,28	2,28	2,23	0,84	0,87	102,52	2,52	2,46	0,87	0,89	102,91	2,91	2,82	0,89	0,92	103,34	3,34	3,23
						Jambu mete	142,79	145,61		145,61	148,93	102,28	2,28	2,23	148,53	152,28	102,52	2,24	2,19	150,58	154,96	102,91	1,76	1,71	152,89	157,99	103,34	1,96	1,90
						Kelapa	20,05	20,45		20,45	20,91	102,28	2,28	2,23	21,11	21,64	102,52	3,49	3,40	23,15	23,82	102,91	10,07	9,79	24,78	25,61	103,34	7,49	7,25
	J U M L A H						163,65	166,88	101,97	166,88	170,69	102,28	2,28	105,26	170,48	174,78	102,52	2,40	105,68	174,60	179,67	308,72	2,79	113,15	178,56	184,52	103,34	2,70	101,12
% Proyeksi Realisasi	1,97%	2,28%	2,52%	2,91%	3,34%																								



Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan (Sebelum Pemberlakuan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan)

URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
I	BELANJA LANGSUNG	Belanja Pegawai	6.969.308.885	7.019.012.869	6.807.658.040	6.880.637.002	97,68%	98,03%	3.534.358.427	3.371.130.567
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	400.000	960.000	0	100,00%	0,00%	(80.000)	(200.000)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.500.000	80.614.500	53.350.178	74.329.014	75,67%	92,20%	45.364.500	34.021.764
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.950.000	52.850.000	10.443.580	35.893.244	43,61%	67,92%	40.875.000	9.468.244
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.480.000	80.710.000	92.589.000	80.710.000	99,05%	100,00%	33.970.000	40.355.000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	48.600.000	48.600.000	47.450.000	47.400.000	97,63%	97,53%	24.300.000	23.100.000
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.250.000	23.202.750	8.250.000	22.075.000	100,00%	95,14%	19.077.750	10.473.625
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.625.771	139.510.585	110.596.050	137.228.000	99,97%	98,36%	84.197.700	67.472.708
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.663.000	44.663.000	52.454.100	44.502.500	99,60%	99,64%	18.331.500	22.171.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	9.000.000	3.941.950	8.990.000	98,55%	99,89%	7.000.000	4.490.000





URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.500.000	17.000.000	31.966.970	16.998.000	78,93%	99,99%	(3.250.000)	8.498.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.820.000	3.820.000	3.120.000	3.220.000	81,68%	84,29%	1.910.000	1.310.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	20.460.000	18.500.000	20.439.900	18.489.101	99,90%	99,94%	8.270.000	9.239.101
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	325.841.729	174.220.000	323.769.822	174.189.186	99,36%	99,98%	11.299.136	87.079.186
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		35.156.000		33.776.000	0,00%	96,07%	35.156.000	16.198.000
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	340.000.000		317.717.100		93,45%	0,00%	(170.000.000)	-
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	51.250.000	73.950.000	47.492.500	65.079.000	92,67%	88,00%	48.325.000	28.104.000
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		42.255.000		40.755.000	0,00%	96,45%	42.255.000	19.627.500
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	67.000.000	60.500.000	66.943.566	54.720.000	99,92%	90,45%	27.000.000	24.470.000
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pelaksanaan Penilaian AKJG	4.300.000	5.550.000	4.300.000	5.550.000	100,00%	100,00%	3.400.000	2.775.000
D	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.700.000	117.880.000	26.150.000	102.800.000	85,18%	87,21%	102.530.000	43.860.000
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4.750.000		4.750.000		100,00%	0,00%	(2.375.000)	-
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	14.250.000	14.310.000	0	14.310.000	0,00%	100,00%	7.185.000	7.155.000
		Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA SKPD	89.700.000	38.040.000	89.700.000	38.040.000	100,00%	100,00%	(6.810.000)	19.020.000



URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	29.250.000	27.120.000	29.250.000	27.120.000	100,00%	100,00%	12.495.000	13.560.000
E	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	50.907.000		49.922.993		98,07%	0,00%	(25.453.500)	-
		Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	84.905.000		83.930.100		98,85%	0,00%	(42.452.500)	-
		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	44.780.000		42.483.861		94,87%	0,00%	(22.390.000)	-
		Pelaksanaan Lomba Bagi Kelompok Tani dan Petani, Kelompok PUAP serta Pekarangan	63.690.000		61.144.000		96,00%	0,00%	(31.845.000)	-
	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI HASIL PERTANIAN	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar		12.626.200		12.581.200	0,00%	99,64%	12.626.200	6.268.100
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian		57.225.085		57.085.185	0,00%	99,76%	57.225.085	28.472.643
F	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	74.388.000		73.112.872		98,29%	0,00%	(37.194.000)	-
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	100.111.900		93.179.311		93,08%	0,00%	(50.055.950)	-
		Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	177.457.000		175.768.200		99,05%	0,00%	(88.728.500)	-
		Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	377.110.000		48.067.800		12,75%	0,00%	(188.555.000)	-
		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	711.129.500		364.169.950		51,21%	0,00%	(355.564.750)	-
		Pengembangan Sistem Informasi Pasar	12.003.200		11.928.200		99,38%	0,00%	(6.001.600)	-
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	8.866.013.000		8.795.227.200		99,20%	0,00%	(4.433.006.500)	-



URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
G	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN.	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	209.060.000		207.684.209		99,34%	0,00%	(104.530.000)	-
H	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	558.032.800		549.414.800		98,46%	0,00%	(279.016.400)	-
		Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	47.753.000		47.753.000		100,00%	0,00%	(23.876.500)	-
		Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija		94.104.000		93.772.900	0,00%	99,65%	94.104.000	46.720.900
		Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Pangan		303.820.125		274.011.425	0,00%	90,19%	303.820.125	122.101.363
		Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari OPT dan DPI		41.900.000		41.856.900	0,00%	99,90%	41.900.000	20.906.900
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	68.052.000		67.760.000		99,57%	0,00%	(34.026.000)	-
		Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	25.942.000		25.909.000		99,87%	0,00%	(12.971.000)	-
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida		103.829.000		90.811.900	0,00%	87,46%	103.829.000	38.897.400
		Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Alat dan Mesin Pertanian/Perkebunan		28.710.000		25.315.000	0,00%	88,17%	28.710.000	10.960.000
		Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lahan dan Air Perkebunan		133.812.300		128.601.050	0,00%	96,11%	133.812.300	61.694.900
		Pembinaan dan Fasilitas Kredit Pembiayaan Pertanian		23.128.000		22.708.000	0,00%	98,18%	23.128.000	11.144.000



URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
J	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	221.825.500	269.384.500	210.752.500	269.310.100	95,01%	99,97%	158.471.750	134.617.850
		Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	88.320.600	400.000	86.955.600	400.000	98,45%	100,00%	(43.760.300)	200.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	159.750.000		155.250.000		97,18%	0,00%	(79.875.000)	-
		Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	49.590.000		47.690.000		96,17%	0,00%	(24.795.000)	-
		Pengendalian Penyakit Menular Zoonosis		157.513.750		156.648.200	0,00%	99,45%	157.513.750	77.891.325
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner		329.675.000		312.591.000	0,00%	94,82%	329.675.000	147.753.500
K	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Pembibitan dan Perawatan Ternak	54.340.000	280.810.000	52.369.665	240.792.700	96,37%	85,75%	253.640.000	100.387.700
		Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	148.650.000	2.190.800.000	147.000.000	2.186.801.700	98,89%	99,82%	2.116.475.000	1.091.401.700
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	197.115.000		144.744.900		73,43%	0,00%	(98.557.500)	-
		Kegiatan Pengendalian Potongan Betina Produktif		29.310.000		9.940.000	0,00%	33,91%	29.310.000	(4.715.000)
	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Perkebunan		25.990.000		25.990.000	0,00%	100,00%	25.990.000	12.995.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN.	Demplot Adaptasi Kekeringan Daerah Rawan Kekeringan		54.015.000		54.010.300	0,00%	99,99%	54.015.000	27.002.800



URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Tanaman Perkebunan		113.725.000		109.821.200	0,00%	96,57%	113.725.000	52.958.700
		Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan		148.764.500		145.414.500	0,00%	97,75%	148.764.500	71.032.250
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	Pengembangan Bibit Tanaman Hortikultura		202.445.000		193.527.550	0,00%	95,60%	202.445.000	92.305.050
		Pengembangan Sentra Tanaman Hortikultura		277.821.915		263.282.515	0,00%	94,77%	277.821.915	124.371.558
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PENYULUH	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian		52.830.000		52.830.000	0,00%	100,00%	52.830.000	26.415.000
		Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh		34.605.000		34.605.000	0,00%	100,00%	34.605.000	17.302.500
	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	Pelaksanaan Lomba Bagi Kelompok Tani dan Petani, Penyuluh serta Pekarangan		59.935.000		59.662.400	0,00%	99,55%	59.935.000	29.694.900
		Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani		37.440.000		37.440.000	0,00%	100,00%	37.440.000	18.720.000
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian		118.520.000		115.885.950	0,00%	97,78%	118.520.000	56.625.950
JUMLAH KESELURUHAN			20.795.084.885	13.310.004.079	19.695.510.917	12.942.507.722	94,71%	97,24%	2.912.461.637	6.287.505.682



Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan (Sesudah Pemberlakuan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan)

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.406.572.398	11.848.952.168	11.205.392.171	11.675.793.210	98,24%	98,54%	5.502.105.972	5.751.317.126
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.279.700	87.064.000	88.800.000	86.716.300	80,52%	99,60%	33.660.150	43.184.300
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.692.000	66.616.000	59.308.800	66.377.300	93,12%	99,64%	27.462.800	33.069.300
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.614.000	240.000	1.786.000	240.000	31,81%	100,00%	-1.021.000	120.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.413.500	2.500.000	3.386.000	2.500.000	99,19%	100,00%	1.679.250	1.250.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.600.000	2.019.000	686.000	2.019.000	26,38%	100,00%	-614.000	1.009.500
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.607.000	1.174.000	744.000	1.174.000	28,54%	100,00%	-559.500	587.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.887.000	6.429.000	12.812.000	6.354.000	99,42%	98,83%	6.368.500	3.139.500
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.466.200	8.086.000	10.077.200	8.052.000	51,77%	99,58%	344.100	4.009.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.334.884.841	10.890.534.708	10.273.545.095	10.735.230.787	99,41%	98,57%	5.106.102.675	5.289.963.433
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.101.369.841	10.668.536.708	10.041.857.995	10.513.616.787	99,41%	98,55%	4.991.173.075	5.179.348.433
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.570.000	219.125.000	228.186.200	218.741.000	99,40%	99,82%	113.401.200	109.178.500
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.923.000	1.569.000	1.513.000	1.569.000	78,68%	100,00%	551.500	784.500
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.636.000	898.000	1.602.000	898.000	97,92%	100,00%	784.000	449.000
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	386.000	406.000	385.900	406.000	99,97%	100,00%	192.900	203.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.288.500	5.214.000	14.288.500	5.214.000	100,00%	100,00%	7.144.250	2.607.000
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.288.500	5.214.000	14.288.500	5.214.000	100,00%	100,00%	7.144.250	2.607.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.488.000	15.342.000	19.393.000	15.342.000	94,66%	100,00%	9.149.000	7.671.000
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.488.000	15.342.000	19.393.000	15.342.000	94,66%	100,00%	9.149.000	7.671.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.620.757	370.600.060	302.928.212	363.779.898	80,01%	98,16%	113.617.834	178.479.868
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.569.740	696.000	3.950.100	696.000	70,92%	100,00%	1.165.230	348.000



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN
	Bangunan Kantor								
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.236.500	25.880.690	22.110.000	25.863.450	99,43%	99,93%	10.991.750	12.923.105
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.103.395	8.263.700	12.812.000	7.930.000	84,83%	95,96%	5.260.303	3.798.150
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.243.122	60.451.670	32.529.300	55.746.200	46,98%	92,22%	-2.092.261	25.520.365
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	0	19.334.800	0	96,67%	0,00%	9.334.800	0
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.236.000	272.588.000	209.607.012	270.824.248	86,53%	99,35%	88.489.012	134.530.248
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.232.000	2.720.000	2.585.000	2.720.000	61,08%	100,00%	469.000	1.360.000
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>462.287.600</i>	<i>426.824.900</i>	<i>457.651.227</i>	<i>418.717.350</i>	<i>99,00%</i>	<i>98,10%</i>	<i>226.507.427</i>	<i>205.304.900</i>
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.957.600	71.844.900	63.821.227	71.257.350	95,32%	99,18%	30.342.427	35.334.900
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.330.000	354.980.000	393.830.000	347.460.000	99,62%	97,88%	196.165.000	169.970.000
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>85.723.000</i>	<i>53.372.500</i>	<i>48.786.137</i>	<i>50.792.875</i>	<i>56,91%</i>	<i>95,17%</i>	<i>5.924.637</i>	<i>24.106.625</i>
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.325.000	41.882.500,00	44.116.137	39.302.875,00	61,00%	93,84%	7.953.637	18.361.625
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.398.000	11.490.000,00	4.670.000	11.490.000,00	34,86%	100,00%	-2.029.000	5.745.000
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	707.409.660	450.276.600	685.872.625	447.979.800	96,96%	99,49%	332.167.795	222.841.500
8	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>321.600.960</i>	<i>237.919.300</i>	<i>314.141.125</i>	<i>237.258.400</i>	<i>97,68%</i>	<i>99,72%</i>	<i>153.340.645</i>	<i>118.298.750</i>
26	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	155.031.460	78.819.300	152.071.625	78.296.400	98,09%	99,34%	74.555.895	38.886.750
27	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	166.569.500	159.100.000	162.069.500	158.962.000	97,30%	99,91%	78.784.750	79.412.000
9	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>6.007.700</i>	<i>0</i>	<i>6.007.700</i>	<i>0</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>3.003.850</i>	<i>0</i>
28	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6.007.700		6.007.700		100,00%	0,00%	3.003.850	0
10	<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>0</i>	<i>13.060.800</i>	<i>0</i>	<i>13.059.900</i>	<i>0,00%</i>	<i>99,99%</i>	<i>0</i>	<i>6.529.500</i>
29	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		6.979.900		6.979.900	0,00%	100,00%	0	3.489.950
30	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		6.080.900		6.080.000	0,00%	99,99%	0	3.039.550



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
11	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.654.000	39.196.500	5.654.000	37.936.500	100,00%	0,00%	2.827.000	18.338.250
31	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	5.654.000	1.080.000	5.654.000	720.000	0,00%	66,67%	2.827.000	180.000
32	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		38.116.500		37.216.500	0,00%	97,64%	0	18.158.250
11	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	374.147.000	160.100.000	360.069.800	159.725.000	96,24%	0,00%	172.996.300	79.675.000
33	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	374.147.000	160.100.000	360.069.800	159.725.000	0,00%	99,77%	172.996.300	79.675.000
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15.414.000	20.808.700	15.234.000	20.378.700	98,83%	0,00%	7.527.000	9.974.350
12	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	15.414.000	20.808.700	15.234.000	20.378.700	98,83%	0,00%	7.527.000	9.974.350
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	15.414.000	20.808.700	15.234.000	20.378.700	0,00%	97,93%	7.527.000	9.974.350
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	117.934.785	198.718.591	116.831.190	196.815.100	99,06%	0,00%	57.863.798	97.455.805
13	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	54.141.445	143.133.836	53.638.450	141.514.200	99,07%	0,00%	26.567.728	69.947.282
35	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	45.012.445	128.795.830	44.627.950	127.177.200	0,00%	98,74%	22.121.728	62.779.285
36	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.129.000	14.338.006	9.010.500	14.337.000	0,00%	99,99%	4.446.000	7.167.997
14	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	7.785.740	10.324.355	7.785.740	10.321.500	100,00%	0,00%	3.892.870	5.159.323
37	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	7.785.740	10.324.355	7.785.740	10.321.500	0,00%	99,97%	3.892.870	5.159.323
15	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	56.007.600	45.260.400	55.407.000	44.979.400	98,93%	0,00%	27.403.200	22.349.200
38	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	15.797.000	17.610.500	15.797.000	17.610.500	0,00%	100,00%	7.898.500	8.805.250
39	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	40.210.600	27.649.900	39.610.000	27.368.900	0,00%	98,98%	19.504.700	13.543.950
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	525.555.360	189.517.000	502.465.100	187.606.000	95,61%	0,00%	239.687.420	92.847.500
16	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	525.555.360	189.517.000	502.465.100	187.606.000	95,61%	0,00%	239.687.420	92.847.500
40	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20.813.200	45.991.800	14.447.700	45.913.400	0,00%	99,83%	4.041.100	22.917.500





NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
41	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	504.742.160	143.525.200	488.017.400	141.692.600	0,00%	98,72%	235.646.320	69.930.000
VI	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	36.479.400	46.367.800	32.169.200	42.848.000	88,18%	0,00%	13.929.500	19.664.100
17	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>36.479.400</i>	<i>46.367.800</i>	<i>32.169.200</i>	<i>42.848.000</i>	<i>88,18%</i>	<i>0,00%</i>	<i>13.929.500</i>	<i>19.664.100</i>
42	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	16.918.600	14.498.800	14.299.000	13.958.000	0,00%	96,27%	5.839.700	6.708.600
43	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	19.560.800	31.869.000	17.870.200	28.890.000	0,00%	90,65%	8.089.800	12.955.500
VII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	75.108.400	90.267.000	74.903.900	89.704.000	99,73%	0,00%	37.349.700	44.570.500
18	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>75.108.400</i>	<i>90.267.000</i>	<i>74.903.900</i>	<i>89.704.000</i>	<i>99,73%</i>	<i>0,00%</i>	<i>37.349.700</i>	<i>44.570.500</i>
44	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	19.898.200	45.810.000	19.864.700	45.809.000	0,00%	100,00%	9.915.600	22.904.000
45	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	15.331.200	17.500.100	15.331.200	17.500.100	0,00%	100,00%	7.665.600	8.750.050
46	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	32.656.000	17.082.000	32.491.000	16.880.000	0,00%	98,82%	16.163.000	8.339.000
47	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	7.223.000	9.874.900	7.217.000	9.514.900	0,00%	96,35%	3.605.500	4.577.450
	JUMLAH	12.884.474.003	12.844.907.859	12.632.868.186	12.661.124.810	98,05%	98,57%	6.190.631.185	6.238.670.881



Pada Tabel 5.1 dan 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Kota Bima, secara keseluruhan selama periode tahun 2019-2022 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, karena berada pada posisi 96,82% dengan rata-rata realisasi selama 4 tahun sebesar 97,14%, dengan rekapitulasi di bawah ini:

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio</b>
<b>2019</b>	20.795.084.885	19.695.510.917	94,71%
<b>2020</b>	13.310.004.079	12.942.507.722	97,24%
<b>2021</b>	12.884.474.003	12.632.868.186	98,05%
<b>2022</b>	12.844.907.859	12.661.124.810	98,57%
<b>Grand Total</b>	59.834.470.826	57.932.011.635	96,82%

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Kebijakan pembangunan pertanian di Kota Bima masih mengalami berbagai tantangan/permasalahan antara lain :

1. Kemampuan dan akses permodalan petani masih lemah, sehingga tidak mampu mengelola usaha taninya yang menghasilkan produk yang berdaya saing dan berorientasi pasar;
2. Pada umumnya petani belum mampu meningkatkan nilai tawar produk pertanian, juga belum mampu menyuarakan kepentingan mereka baik secara ekonomi maupun secara politik;
3. Manajemen skala usaha pertanian pada umumnya masih rendah, sehingga potensi sektor pertanian belum tergali secara optimal
4. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat masifnya alih fungsi lahan;



5. Pertumbuhan populasi ternak cenderung stagnan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging masih dipasok dari luar daerah terutama daging unggas;
6. Regenerasi tenaga kerja sektor pertanian masih rendah;
7. Pengetahuan, keterampilan dan sikap petani untuk penerapan teknologi anjuran masih perlu untuk terus ditingkatkan;
8. Harga komoditi pertanian yang relatif tidak stabil atau fluktuasi harga yang masih tinggi terutama pada saat panen raya;
9. Penggunaan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan belum sesuai anjuran;
10. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana lahan dan air yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian;
11. Terbatasnya sumber daya air sebagai air irigasi pertanian;
12. Pengelolaan lahan kering dan miring belum menerapkan sistem konservasi lahan;
13. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan konservasi sumber daya alam (SDA) masih rendah;
14. Kesadaran dalam melaksanakan aktifitas pertanian secara berkelompok yang masih kurang;
15. Liberalisasi perdagangan/perdagangan bebas.
16. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi, kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar
17. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting sistem pemeliharaan ternak secara intensif

#### 2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
2. Adanya program diklat bagi petugas;
3. Adanya koordinasi yang baik;



4. Adanya kewenangan perencanaan dari bawah (bottom up);
5. Adanya kinerja yang baik dari petugas lapangan;
6. Adanya kelembagaan petani/peternak (kelompok tani/ternak);
7. Tersedianya tenaga kerja terampil dan mekanisasi pertanian;
8. Adanya potensi sumber daya alam yang memungkinkan pengembangan agribisnis;
9. Adanya pasar yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani/peternak;
10. Tersedianya sarana produksi yang mendorong penerapan paket teknologi anjuran;
11. Minat masyarakat untuk berusaha tani cukup tinggi.
12. Luas lahan sawah 2.422 Ha merupakan irigasi dengan IP 1-3 untuk pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.
13. Pangsa pasar besar. Hal ini ditunjang oleh posisi Kota Bima sebagai kota transit yang berada pada segi tiga emas pariwisata (Bali–Komodo–Tanah Toraja);
14. Jalur transportasi lancar, ditunjang oleh adanya sarana terminal dan pelabuhan laut.
15. Jalur telekomunikasi lancar, baik melalui telepon rumah maupun telepon seluler;
16. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan membawa konsekwensi terhadap meningkatnya jumlah permintaan akan produk-produk pertanian, baik produk mentah maupun olahan untuk pasar domestik, regional, nasional maupun ekspor.



# **BAB 3** PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## **ISU NASIONAL**

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7 - 6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan pertanian tiga tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar.

Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani. Orientasi pertumbuhan ekonomi



bukan hanya mengejar kepada target pertumbuhan, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*).

Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan).

Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi



arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024

Kondisi umum selama periode 2018-2022, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut, di antaranya: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) penguatan kelembagaan petani; (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; (6) pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi; dan (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Penguatan kondisi ketahanan pangan dan peningkatan daya saing dapat dilihat pada kondisi umum dan permasalahan sektor pertanian.

Adapun kondisi permasalahan dan potensi umum pembangunan pertanian di Indonesia selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :



### a. Keanekaragaman Hayati

Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (*mega biodiversity*). Keanekaragaman hayati



(*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

### b. Lahan Pertanian



Indonesia juga memiliki potensi lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan suboptimal, seperti lahan kering, rawa pasang

surut, dan rawa lebak yang produktivitasnya rendah karena berbagai kendala, seperti kekurangan dan/atau kelebihan air, tingginya kemasaman tanah dan salinitas, serta keracunan dan kahat unsur hara. Apabila lahan suboptimal dapat dimanfaatkan melalui rekayasa penerapan inovasi teknologi budi daya dan dukungan infrastruktur yang memadai, maka lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan-lahan produktif untuk pengembangan budi daya berbagai komoditas pertanian.





Data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha di antaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Potensi ketersediaan sumber daya lahan untuk pengembangan padi sawah seluas 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai, bawang merah dan tebu 7,3 juta ha, serta tanaman cabai dan bawang merah dataran tinggi 154,1 ribu ha.

Luas dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun sesungguhnya juga merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung, air tanah dan air permukaan potensial mendukung pengembangan usaha pertanian. Berdasarkan analisis ketersediaan air, diprediksikan bahwa kebutuhan air sampai tahun 2020 untuk Indonesia masih dapat dipenuhi dari air yang tersedia saat ini. Proyeksi permintaan air untuk tahun 2020 sebesar 18% dari total air tersedia, yang digunakan sebagian besar untuk keperluan irigasi (66%), sisanya 17% untuk rumah tangga, 7% untuk perkotaan dan 9% untuk industri. Sedangkan berdasarkan analisis yang sama untuk satuan pulau, pada tahun 2020 Pulau Bali dan Nusa Tenggara akan membutuhkan sebanyak 75% dari air yang tersedia saat ini di wilayahnya, disusul Pulau Jawa sebesar 72%, Sulawesi 42%, Sumatera 34%, adapun Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing membutuhkan 2,3% dan 1,8% dari total air tersedia saat ini.

Pembangunan pertanian tiga tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut :



**a. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi**

Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan Penduduk 2015-2045, diperkirakan pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318,96 juta atau



tumbuh 24.80% (63,37 Juta Jiwa) dari 2015. Sektor pertanian dituntut memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia sepanjang waktu sebagai syarat dasar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja nasional.

Selanjutnya, terkait konsumsi per kapita, terdapat 5 (lima) bahan makanan penting nasional yang konsumsinya berpotensi terus meningkat yaitu: beras, ikan, udang segar, tahu-tempe, telur ayam ras/kampung, dan daging ayam ras/kampung. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan swasembada padi (data KSA sudah melebihi konsumsi nasional), dan meningkatkan produksi jagung pakan (untuk pemenuhan budidaya ayam ras/kampung untuk telur dan dagingnya) serta kedelai (bahan baku tahu tempe). Rata-rata konsumsi per kapita beberapa macam bahan pangan penting di Indonesia 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini: (Sumber: BPS Tahun 2022).

Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2018-2022

Jenis Bahan Makanan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Beras lokal/ketan	kg	1,551	1,504	1,505	1,569	1,560
Jagung basah dengan kulit	kg	0,029	0,029	0,050	0,024	0,022
Jagung pekal/pepitan	kg	0,019	0,017	0,018	0,016	0,014
Ketela pohon	kg	0,081	0,084	0,083	0,119	0,108
Ketela rambat	kg	0,060	0,061	0,059	0,071	0,065
Sapi*	kg	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002
Ikan dan udang segar <sup>1</sup>	kg	0,224	0,226	0,222	0,222	0,227
Ikan dan udang diawetkan	ons	0,428	0,428	0,414	0,418	0,420
Daging sapi/kerbau	kg	0,008	0,008	0,008	0,009	0,010
Daging ayam ras/kampung	kg	0,123	0,124	0,130	0,142	0,153
Telur ayam ras/kampung <sup>2</sup>	kg	2,152	2,137	2,107	2,290	2,336
Telur itik/manila/asin	butir	0,029	0,029	0,022	0,022	0,142
Susu kental manis	(337 gr)	0,088	0,072	0,070	0,072	0,071
Susu bubuk bayi	kg	0,013	0,013	0,014	0,013	0,013
Bawang merah	ons	0,529	0,537	0,516	0,561	0,560
Bawang putih	ons	0,230	0,246	0,220	0,259	0,267
Caka merah	ons	0,024	0,028	0,022	0,028	0,027
Caka rawit	ons	0,028	0,028	0,024	0,027	0,026
Kacang kedelai	kg	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Tahu	kg	0,150	0,152	0,153	0,150	0,146
Tempe	kg	0,146	0,139	0,140	0,146	0,140
Minyak kelapa/jagung/gurung lainnya	liter	0,227	0,228	0,223	0,223	0,244
Kelapa	butir	0,082	0,080	0,087	0,088	0,078
Gula pasir	ons	1,309	1,272	1,254	1,281	1,212
Gula merah	ons	0,124	0,119	0,122	0,134	0,125

\* Ikan segar meliputi ikan darat, laut, dan udang  
<sup>1</sup> Satu butir telur ayam kampung diperkirakan beratnya 5 gram  
<sup>2</sup> Ditah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susek)  
 Sumber : Publikasi Statistik Indonesia



Dalam rangka ketersediaan dan akses pangan penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran, perlu diketahui bahwa: (1) Ketersediaan kalori pangan penduduk dalam rentang waktu 2013-2017 selalu lebih tinggi dari angka kecukupan dan konsumsinya, dan rata-rata tingkat konsumsinya masih di bawah angka kecukupannya; (2) Ketersediaan protein penduduk dalam rentang waktu 2018-2022 selalu lebih tinggi dari angka kecukupan dan konsumsinya; (3) dalam kurun waktu 2018-2022 rata-rata tingkat konsumsinya masih dibawah angka kecukupannya; dan (4) setelah itu (kurun waktu 2018-2022) rata-rata tingkat konsumsinya telah di atas angka kecukupannya. Dengan demikian, ketersediaan kalori dan protein secara nasional mengalami surplus, namun demikian jika konsumsi pangan dilihat dari kelompok pengeluaran penduduk, konsumsi pada kelompok kuintil 1 sampai 2 masih di bawah standar kecukupan gizi nasional. Hal ini, disebabkan permasalahan akses penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan karena kemiskinan walaupun secara nasional ketersediaan kalori dan protein dalam kondisi surplus.

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu instrumen analisis ketersediaan yang digunakan untuk mengevaluasi situasi produksi dan ketersediaan pangan suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu. Hasil analisis ketersediaan menggunakan NBM tahun 2020 (data sangat sementara) memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan Indonesia sebagai berikut: 1. Ketersediaan pangan dalam bentuk energi sebesar 2.754 Kalori/kapita/hari; protein sebesar 81,57 gram/kapita/hari (protein nabati 52,88 gram dan protein hewani 28,70 gram); dan lemak sebesar 48,91 gram/kapita/hari (lemak nabati 33,61 gram dan lemak hewani 15,29 gram). Ketersediaan energi dan protein ini lebih tinggi dibandingkan ketersediaan energi dan protein ideal sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari. 2. Ketersediaan energi, protein dan lemak masih didominasi oleh kontribusi ketersediaan dari bahan pangan nabati.



Kontribusi bahan pangan sumber nabati terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak total masing-masing sebesar 90,33% (2.488 Kalori), 64,82% (52,88 gram protein), dan 68,73% (33,61 gram lemak). 3. Ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2020 sebesar 2.754 Kalori lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.006 Kalori. Hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya perkiraan produksi minyak goreng sawit dan produksi kedelai. 4. Ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2020 sebesar 81,57 gram sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 81,80 gram, karena turunnya perkiraan ketersediaan protein dari kelompok buah/biji berminyak dan daging. 5. Ketersediaan protein hewani tercatat terus mengalami peningkatan dari 25,53 gram/kapita/hari tahun 2018 menjadi 27,99 gram/kapita/hari tahun 2019 dan 28,70 gram/kapita/hari tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan angka ketersediaan protein ideal sebesar 63 gram/kapita/hari, maka penyediaan protein dari pangan hewani pada tahun 2020 telah mencapai 45,56%. 6. Dibandingkan dengan skor pada tahun sebelumnya, skor PPH tahun 2020 mengalami peningkatan pada skor kelompok pangan hewani dari 20,95 (2019) menjadi 21,04 (2020) dan mengalami penurunan pada kelompok buah dan sayur dari 26,04 (2019) menjadi 24,96 (2020).

**b. Defisit Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**

Karakteristik usaha pertanian di Indonesia adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non tariff barrier yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor.



Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya Beli konsumen pada Neraca perdagangan pertanian Indonesia periode 2015-2019 menunjukkan nilai surplus rata-rata US\$ 11,9 miliar/tahun. Subsektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor dan surplus terbesar di sektor pertanian. Sementara perdagangan subsektor pertanian Indonesia lainnya masih dalam posisi defisit. Ke depan perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antardaerah) maupun kerja sama regional (antarnegara).

**c. Status dan Luas Kepemilikan Lahan**

Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Luas lahan menjadi salah satu faktor penentu tercapainya target produksi. Khusus untuk lahan padi sawah, penetapan luas baku lahan sawah dilakukan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Penghitungan luas lahan baku sawah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan menggunakan metode survei



KSA yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Badan Informasi dan Geospasial (BIG); serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Kementerian Pertanian. Sejak tahun 2017, perhitungan luas lahan baku sawah dilakukan melalui dua tahapan yaitu menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi dan melalui validasi ulang di lapangan. Pada tahun 2018, dua tahapan tersebut dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi yang mencakup 87 persen dari total luas lahan baku sawah di Indonesia.

Luas lahan baku sawah nasional menurut Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 399/KEP-23.3/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018, tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018 seluas 7.105.145 Hektar atau berkurang 645.854 Hektar dari luas lahan 2013. Pada 2019, Kementerian ATR/BPN kembali menetapkan luas lahan baku sawah nasional 2019 berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019 yaitu sebesar 7.463.948 hektar.

Selain masalah luas lahan yang menurun, masalah lain yang terkait dengan lahan yaitu kepemilikan lahan oleh petani yang semakin sempit. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018, luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian kurang dari 0,5 hektar sebanyak 15,89 juta rumah tangga atau 59,07% dari total rumah tangga petani. Rumah tangga petani yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 14,62 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 15,89 juta rumah tangga pada tahun 2018. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum; (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan; dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah.



#### **d. Pendidikan dan Usia Petani**

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

#### **e. Kemiskinan Perdesaan**

Pembangunan pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional melalui ekspor, juga sebagai faktor utama pertumbuhan wilayah perdesaan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan. Berdasarkan data BPS (2018), penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu desa (87%) berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan



bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan.

Subsektor padi dan palawija berkontribusi terhadap 60% penghasilan penduduk desa, yang diikuti oleh perkebunan karet dan kelapa sawit sebesar 16%, hortikultura 5%, kelapa 5%, kopi 3%, kakao 2% dan lainnya 9%. Peternakan sebagai sumber protein nasional hanya berkembang di 1% wilayah pertanian perdesaan. Kepemilikan lahan/ternak, teknologi, kompetensi, inovasi, produktivitas, efisiensi, serta kepastian harga dan pasar akan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan. Laju penurunan kemiskinan perdesaan adalah sebesar 1,08% per tahun, lebih rendah jika dibandingkan perkotaan. Secara nasional jumlah penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun (3,32%/tahun) selama periode 2015-2019.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan menunjukkan bahwa penduduk desa yang sebagian besar bekerja sebagai petani belum menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Arus uang yang mengalir ke desa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber pembiayaan lainnya belum sepenuhnya dinikmati penduduk miskin di perdesaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, anggaran untuk kedaulatan pangan cukup tinggi mencapai Rp 96,2 triliun pada tahun 2019.

#### **f. Dampak Disrupsi Revolusi Industri 4.0**

Perubahan dunia yang begitu cepat dengan berkembangnya inovasi dan teknologi mendorong revolusi baru yang disebut revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Semua itu mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level





yang paling mendasar, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri termasuk industri pertanian.

Di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu kunci dari perubahan ini adalah penggunaan internet oleh petani. BPS (2018) menyatakan bahwa potensi internet di tingkat petani dan perdesaan sebesar 93,9%. Sebagian besar pengguna internet melakukan akses internet melalui Smartphone/telepon seluler (96,6%). Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) tahun 2018, terdapat 77.172 (91,95%) desa/kelurahan yang telah dapat menerima sinyal telepon selular. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011 dan 2014, di mana desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal telepon selular hanya sebanyak 70.610 (89,82%) desa/kelurahan pada tahun 2011 dan 74.473 (90,61%) desa/kelurahan pada tahun 2014.

Dari total petani Indonesia (33,4 juta petani), terdapat 4,5 juta petani menggunakan internet (13%). Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 2G, 3G dan 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian.

#### **g. Dampak Perubahan Iklim (DPI)**

Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan.



Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 188.662 Ha terkena banjir (52.265 ha di antaranya puso karena banjir) dan 255.974 Ha terkena kekeringan (75.246 ha di antaranya puso karena kekeringan).

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Di samping itu, perlu menciptakan teknologi tepat guna dan menciptakan varietas yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran kenaikan suhu, kekeringan, banjir atau genangan dan salinitas.

#### **h. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani**

Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering dikeluhkan oleh petani. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian



sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menyatakan hanya sekitar 15 persen dari sekitar 8.000 sampel petani yang sudah mengakses kredit bank, sedangkan mayoritas sebesar 52 persen masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan non-Bank lainnya. Sementara itu, 33 persen petani lainnya mengandalkan kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kredit usaha rakyat (KUR). Meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

Ketidakmampuan petani untuk mengakses sumber pemodal formal diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan dari kondisi ini adalah bagaimana berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan agar berpihak dan mau menyalurkan modalnya ke sektor pertanian.

## **ISU REGIONAL**

### **1. Isu-Isu Pembangunan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Isu pembangunan pertanian di NTB sangat kompleks mulai dari ketersediaan lahan, alih fungsi lahan pertanian, ketersediaan sarana dan



prasarana pertanian, alat dan mesin pertanian, pengolahan hasil, kebijakan harga dan pemasaran serta implementasi dan integrasi program berbagai SKPD dan berbagai kebijakan lainnya.

### **Ketersediaan Lahan Pertanian**

Ketersediaan lahan pertanian mengalami pertumbuhan yang lamban sekali. Penambahan lahan sawah melalui pencetakan sawah baru masih terbatas pada tambahan lahan saja dan belum mendapat jaringan irigasi. Artinya pencetakan lahan sawah yang ada selama ini tidak diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi. Implikasi dari kondisi yang ada tersebut yaitu tidak mengakibatkan peningkatan produksi dan kualitas produksi.

### **Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi isu sentral pembangunan pertanian saat ini. Alih fungsi lahan tersebut dapat dilakukan oleh individu, berkelompok, pihak swasta dan bahkan oleh pemerintah melalui pemberian ijin kepada pihak swasta. Bentuk alih fungsi lahan sawah khususnya yaitu untuk perumahan penduduk, fasilitas umum, perkantoran dan sebagainya. Alih fungsi lahan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan hasil produksi pertanian dan berkurangnya nilai guna dari bendungan, cek dam dan embung yang merupakan investasi dari pemerintah. Untuk melindungi lahan pertanian tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda NTB Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Berkelanjutan (LP2B). Kedua kebijakan tersebut belum diakomodir oleh pemerintah daerah (kabupaten dan kota) di Provinsi NTB.

### **Prasarana dan Sarana Pertanian**

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah bendung, embung dan cek dam terbanyak di Indonesia, namun keterjangkauannya belum merata, sehingga sarana dan prasarana terus dibangun dan mengalami perkembangan. Jumlah bendung, embung dan cek dam pada tahun 2017



sekitar 163 unit dan khususnya prasarana pertanian seperti embung telah mengalami perbaikan sejumlah 11.400 unit mulai dari tahun 2012. Demikian juga kondisinya dengan Jalan Usaha Tani (JUT) selalu bertambah setiap tahunnya. Tahun 2012 panjang jalan usaha tani sekitar 36.000 meter dengan sebaran 48,06% berada di Kab. Lombok Timur dan 26,39% berlokasi di Kab. Lombok Tengah dan sisanya 24,55% berada di kabupaten lain.

### **Alat dan Mesin Pertanian**

Alat dan mesin pertanian selalu berkembang sertiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah alat mesin pertanian yaitu 1495 unit dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 1565 unit dan kemudian pada tahun 2022 terdapat tambahan sejumlah 522 unit termasuk traktor roda 4. Distribusi hand traktor tersebut sebadian besar berada di Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur dan Bima. Selain hand traktor terdapat juga tambahan alat pertanian berupa pompa air dan alat panen padi (*combine*) dan sebagainya dengan ragam jumlah yaitu 14 jenis alat dan mesin pertanian.

### **Pengolahan Hasil Pertanian**

Hasil produksi pertanian seperti tanaman pangan dan hortikultura masih belum banyak memberikan nilai tambah karena hampir seluruh komoditas pertanian diperdagangkan dalam bentuk produk primer, khususnya jagung, bawang dan cabe. Kondisi ini yang menyebabkan munculnya resiko pada pengusahaannya. Pasar jagung sangat ditentukan oleh permintaan dari luar provinsi, demikian juga halnya dengan bawang merah dan cabe. Permintaan lokal terhadap komoditas tersebut sangat lemah, mengingat bahwa industri yang berbahan baku jagung dan hortikultura sangat terbatas dengan volume yang rendah. Peumbuhan industri berbahan baku jagung dan hortikultura perlu didorong pertumbuhannya oleh pemerintah



sehingga mampu mendatangkan nilai tambah dan secara regional Provinsi NTB dapat berkembang menjadi sektor basis.

### **Distribusi Sarana Produksi**

Permasalahan distribusi sarana produksi menjadi isu strategis yang mendapat perhatian serius dalam pembangunan pertanian pangan dan hortikultura saat ini. Ketersediaan pupuk di lokasi pada saat dibutuhkan sering menjadi persoalan yang dihadapi petani. Terganggunya ketersediaan pupuk terjadi pada saat Musim Hujan (MH). Hal ini diduga akibat dari adanya persaingan dari usahatani padi pada lahan sawah dan jagung untuk lahan kering, sehingga pupuk yang seharusnya disediakan untuk padi namun digunakan untuk padi jagung pada lahan kering.

Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan kurang sempurnanya perencanaan kebutuhan pupuk pada masing-masing lokasi, terutama perencanaan kebutuhan untuk pupuk jagung pada lahan kering. Peran kelembagaan yang terlibat dalam distribusi pupuk seharusnya ditertibkan. Bisa saja kelembagaan yang diberikan tanggungjawab untuk mendistribusikan pupuk untuk padi, namun dengan adanya rent seeking pada usahatani jagung, maka pupuk tersebut didistribusikan untuk usahatani jagung.

### **Pasar dan Kebijakan Dasar (*Floor Price*)**

Pasar komoditas jagung dan hortikultura sangat tergantung pada pasar luar daerah. Kondisi ini yang menyebabkan petani berada pada kondisi prices taker, sehingga menyerah pada kondisi pasar monopsoni. Pasar tidak mampu menghadapi para pembeli yang bersatu. Lemahnya daya tawar petani akan berakibat jangka panjang yaitu menurunnya gairah untuk berproduksi.

Kebijakan harga sesungguhnya merupakan instrumen untuk mendorong dan menggairahkan petani untuk berproduksi. Namun kebijakan harga seperti kebijakan harga dasar masih belum optimum dalam implementasinya. Sering sekali petani menerima harga jauh lebih rendah dari harga dasar yang berlaku. Komoditas pangan seperti padi



jagung dan kedele sudah memiliki harga dasar, sedangkan komoditas bawang merah dan cabe belum mempunyai harga dasar, sehingga harga komoditas tersebut sangat berpluktuatif sekali.

### **Program Terintegratif**

Isu yang sering ditemui dalam penyusunan perencanaan adalah adanya keegoan masing-masing SKPD atau dinas terkait. Setiap SKPD menyusun perencanaan sesuai dengan tupoksi masing-masing, namun tidak ada kolaborasi antar SKPD, Kelembagaan ini belum mengkaji secara lengkap visi misi pembangunan pertanian secara utuh, sehingga belum mampu menyusun program dan kegiatan bersama sebagai tujuan bersama untuk mencapai misi bersama.

Sebagai contoh, pada saat petani mengembangkan produk pertanian tertentu, maka petani akan menghadapi persoalan teknis, kelembagaan, pasar, pengolahan dan keuangan. Petani butuh suatu pengetahuan dan teknologi usahatani, petani butuh masalah kelembagaan keuangan, petani butuh kepastian harga dan pasar.

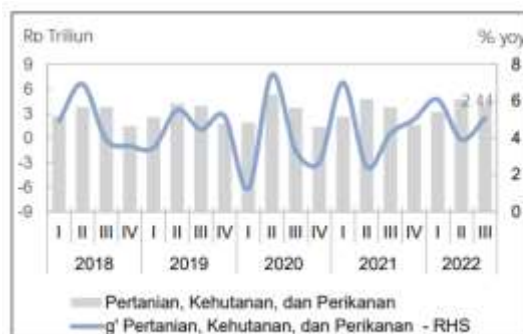
Dalam pembangunan pertanian tentu seharusnya banyak melibatkan sektor terkait, seperti sekte teknis, sektor industri pengolahan dan pasar, sektor keuangan/koperasi dan ketahanan pangan. Dari sektor yang terlibat tersebut, maka dapat disusun SKPD yang seharusnya terintegrasi yaitu Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi.

Pada triwulan III 2022, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,44%, meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang berkontraksi 0,17%. Perbaikan kinerja ini didorong oleh peningkatan produksi tanaman pangan khususnya komoditas jagung yang pada triwulan III 2022 tercatat tumbuh signifikan 33,29%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 21,84%. Hasil panen jagung triwulan III 2022 tergolong optimal didukung oleh cuaca yang lebih kondusif sehingga mendukung produktivitas. Tanaman jagung relatif tahan pada kondisi tanah yang kering dan tidak terlalu membutuhkan pupuk atau perawatan yang



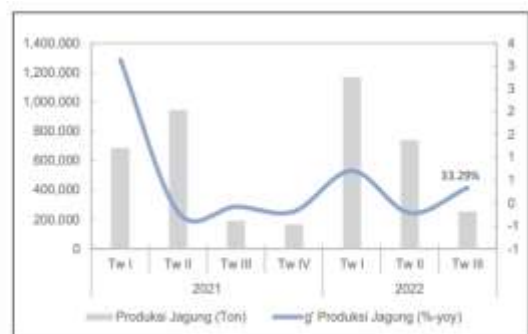
intensif. Selain itu, tren kenaikan harga jagung turut menjadi faktor pendorong petani untuk beralih menanam komoditas jagung dibanding komoditas pertanian lainnya. Pertumbuhan kinerja pertanian yang lebih tinggi relatif tertahan oleh penurunan produksi padi dan hortikultura. Produksi komoditas padi pada triwulan III 2022 berkontraksi 20,23%, lebih dalam dibandingkan triwulan II 2022 yang berkontraksi 13,91%. Selanjutnya produksi komoditas bawang merah pada triwulan III 2022 juga tercatat mengalami penurunan dari 4,31% pada triwulan II 2022 menjadi 1,50% di triwulan III 2022. Kondisi yang sama juga terjadi untuk komoditas cabai rawit yang pada triwulan III 2022 hanya tumbuh 9,09%, menurun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 24,06%.

Ke depan, terdapat potensi peningkatan produktivitas pertanian sejalan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan bendungan di Provinsi NTB. Pembangunan Bendungan Bintang Bano (65,84 juta m<sup>3</sup>), bendungan terbesar dari sisi kapasitas tampung di NTB, telah selesai pada tahun 2021 dan berimplikasi pada peningkatan produktivitas pertanian ke depannya. Bendungan ini dapat mendukung penyediaan irigasi lahan pertanian seluas 6.700 hektar, meningkat dibandingkan sebelum bendungan dibangun yaitu 4.200 hektar dengan sistem tadah hujan. Diharapkan bendungan ini dapat mendorong penanaman padi 2 (dua) kali dalam setahun. Beberapa proyek bendungan lain adalah Bendungan Beringin Sila (27,46 juta m<sup>3</sup>) yang ditargetkan selesai di tahun 2022 serta Bendungan Tiu Suntuk (56 juta m<sup>3</sup>) dan Bendungan Meninting (12,18 juta m<sup>3</sup>) yang masih berjalan di tahun 2022 dan berlanjut di tahun 2023.



Sumber: BPS, diolah

Grafik. PDRB Provinsi NTB Sektor Pertanian



Sumber: Dinas Pertanian Prov NTB, diolah

Grafik Perkembangan Produksi Jagung NTB





Sebagai Lumbung Pangan Nasional khususnya produksi ketersediaan pangan pokok pasca gempa dan harga kebutuhan pangan pokok terkendali ditunjang dengan angka pangan pokok NTB pada pertengahan 2019 terkendali dalam rentang 3,5 kurang dari 1% ini merupakan sinergi yg kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Subsektor peternakan mempunyai peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak melalui ketersediaan daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi), susu dan telur sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Ketersediaan Produksi daging merupakan ketersediaan dari produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi dalam bentuk meatyield. Pada tahun 2021, capaian ketersediaan produksi daging sebesar 79.445,58 ton atau meningkat 6,96 persen dari tahun 2020 yaitu sebesar 74.276,68. Bila dilihat sasaran indikator kinerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB terhadap peningkatan ketersediaan produksi daging yang ditargetkan tahun 2021 adalah sebesar 3 persen, berdasarkan realisasi sebagai mana tabel 5.3 diatas dapat dicapai 6,96 persen atau terealisasi diatas 200 persen. Bila dilihat dari tingkat konsumsi daging tahun 2021 tingkat konsumsi daging masyarakat NTB sebesar 10,43 kg/kapita/tahun atau naik sebesar 6,54 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,79 Kg/kapita/tahun. Tingginya produksi daging tahun 2021 karena tingginya masuk DOC unggas yaitu sebesar 49.719.370 ekor dari luar NTB.

Ketersediaan Produksi telur tahun 2021 sebesar 111.911,40 ton atau mengalami peningkatan sebesar 35 persen apabila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2020 yaitu sebesar 82,897,60. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi telur ayam buras meningkat 16,28 persen (5.342,4 ton), telur ayam ras 49,83 persen (21.612,0 ton), telur itik 28,62 persen (2.058,6 ton), hal ini dapat dilihat dengan tinggi distribusi masuknya DOC selama tahun 2021 dari luar daerah yakni sebesar 6.410.000 ekor dan telur bibit ayam yang masuk selama tahun 2021 sebesar 18.580.710 butir. Selain itu, peningkatan pertumbuhan produksi telur ini, salah satunya didorong oleh peningkatan



konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat saat masa pandemi Covid19 serta adanya event internasional di NTB. Konsumsi telur selama tahun 2021 sebesar 16,83 kg/kapita/Tahun dari tahun 2020 yang hanya sebesar 12,26 kg/kapita/tahun atau naik sebesar 37,28 persen.

Rata-rata NTP Sub Sektor Peternakan tahun 2021 sebesar 108,61 sedangkan rata-rata NTP Sub Sektor Peternakan tahun 2020 sebesar 107,82 atau mengalami kenaikan sebesar 0,79 point dibandingkan tahun 2020. Bila dilihat dari target kinerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 untuk indikator sasaran peningkatan NTP Sub Sektor Peternakan dengan target 110 poin namun hanya terealisasi 108,61 point atau (98,73 persen). Hal ini disebabkan salah satunya oleh fluktuatifnya harga ayam broiler hidup (liverbird) dan harga telur sementara kenaikan beberapa harga biaya produksi seperti pakan dan harga bibit ayam/Day Old Chick (DOC). Upaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan NTP di atas 100 dilakukan dengan meningkatkan indeks yang diterima peternak berupa peningkatan harga ternak dan produk hasil ternak serta menurunkan indeks yang harus dibayar peternak, utamanya komponen biaya produksi.

NTB merupakan daerah penyangga pangan untuk propinsi tetangga seperti Bali dan NTT, dan bila sektor ini digarap lebih serius dari hulu sampai hilir, dari proses penanaman, pasca panen hingga ke industriasi atau pengolahan, maka pertanian di NTB bisa menjadi sumber penghasilan atau kekuatan yang mensejahterakan warga masyarakatnya.

## **2. Isu-Isu Pembangunan Sub Sektor Perkebunan**

Propinsi NTB telah merumuskan program pembangunan perkebunan berdimensi global, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan



masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Secara ekologis berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan salah satu komoditas pertanian yang pertumbuhannya positif terhadap pendapatan devisa negara adalah komoditas perkebunan.

Komoditas perkebunan secara ekonomi mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terutama peluangnya dibidang ekspor, sementara itu kebijakan dasar pembangunan perkebunan mengarah kepada upaya menggerakkan dan memfasilitasi pengembangan produksi perkebunan yang berorientasi pasar melalui pemberdayaan dan penguatan hilir guna memperoleh nilai tambah dan daya saing dengan dukungan partisipasi masyarakat, beberapa komoditas unggulan di sub sektor perkebunan di wilayah NTB yang saat ini dibudidayakan antara lain kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa. Komoditas yang dibudidayakan ini, tentunya perlu didukung oleh upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan, serta meningkatkan nilai tambah dari produk-produk perkebunan tersebut.

Secara garis besar, masalah-masalah pembangunan perkebunan yang dihadapi saat ini mencakup dua kelompok permasalahan. Selain permasalahan struktural yang berkaitan dengan program pelaksanaan pembangunan perkebunan, juga permasalahan fungsional yang terkait dengan aspek pembangunan perkebunan, yang meliputi aspek budidaya dan produktivitas, kemampuan dan pemantapan SDM petani dan petugas lapangan, penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kemitraan, oleh karenanya perlu lebih memperhatikan aspek-aspek kewilayahan dan sumber daya secara keseluruhan.

### **3. Isu-Isu Pembangunan Sub Sektor Peternakan**

#### **3.1. Isu Strategis**

Isu-isu strategis pembangunan sub sektor peternakan Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya produk impor akibat perdagangan bebas;



- b. Meningkatnya permintaan pangan asal ternak sebagai pemenuhan sumber protein;
- c. Manajemen pengelolaan RPH;
- d. Budidaya, pakan, keswan;
- e. Pemasaran, manajemen usaha dan kapasitas SDM
- f. Belum bisa bersaing di pasar regional / nasional industri olahan
- g. NTB menjadi objek daerah tujuan wisata regional, nasional dan internasional (mendukung kek mandalika untuk pelaksanaan Moto-GP 2021).

### 3.2. Arah Kebijakan

- a. Manajemen pengelolaan RPH dan RPU
  - Sosialisasi, Optimalisasi Penyediaan Daging ASUH (Outlet Daging ASUH pada pusat pariwisata)
  - Penyediaan Cold Storage
- b. Manajemen budidaya
  - Peningkatan produksi dan produktifitas ternak melalui IB
  - Pertukaran pejantan unggul dikawasan padang penggenbalaan
- c. Manajemen pakan
  - Pengembangan pakan ternak berbasis lamtoro taramba, pengembangan teknologi pakan serta pembangunan pabrik pakan skala industri rumah tangga
- d. Manajemen kesehatan hewan
  - Pencegahan dan penanggulangan penyakit PHMS
- e. Manajemen pemasaran dan usaha
  - Eksposisi hasil peternakan
  - Meningkatkan kualitas dan Legalitas Produk
  - Akses modal usaha
- f. Peningkatan kapasitas SDM
  - Bimtek , Pelatihan, Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Dalam kerangka pengembangan ekonomi wilayah peran sub sektor peternakan memiliki kaitan yang kuat di hulu dan hilir. Namun



dekimian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan Dinamisasi Kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat peran strategis pemerintah daerah provinsi NTB untuk mewujudkan swasembada daging dan telur adalah mengatasi masalah ditingkat usaha tani melalui penyerataan usaha kelompok dan mendukung masyarakat terhadap akses pembiayaan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi serta swasta pada usaha penggemukan budidaya dan pengolahan hasil komoditas startegis seperti sapi, kambing dan unggas.

Berdasarkan data release Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB bahwa terjadi peningkatan produksi sebesar 6,96% dari 74.278,86 ton tahun 2020 menjadi 79.445,58 ton tahun 2021, untuk produksi telur juga mengalami peningkatan sebesar 35% dari 82.897,6 ton tahun 2020 menjadi 111.911,4 ton tahun 2021. Produksi daging pada masing-masing komoditas tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Ketersediaan Produksi (Ton) Tahun		
		2020	2021	Naik/Turun (%)
A.	<b>Ketersediaan Produksi Daging</b>			
	- Sapi	13.801,0	14.242,6	3,20
	- Kerbau	1.426,0	1.451,7	1,80
	- Kuda	606,0	647,8	6,90
	- Kambing	663,0	696,2	5,01
	- Domba	28,0	29,0	3,57
	- Babi	144,0	147,9	3,57
	- Ayam Ras	46.281,9	48.942,3	5,75
	- Ayam Buras	10.565,0	12.308,2	16,50
	- Itik	762,0	979,9	28,60
	<b>Jumlah</b>	<b>74.278,86</b>	<b>79.445,58</b>	<b>6,96</b>
B.	<b>Ketersediaan Produksi Telur</b>			
	- Ayam Ras	43.374,1	64.986,9	49,83
	- Ayam Buras	32.330,9	37.673,3	16,52
	- Itik	7.192,6	9.251,2	28,62
	<b>Jumlah</b>	<b>82.897,6</b>	<b>111.911,4</b>	<b>35,00</b>

Perkembangan Usaha Pembibitan dalam mengembangkan usaha budidaya sub sektor peternakan bibit merupakan komponen terpenting yang mempengaruhi keberlanjutan usaha penggemukan sapi potong



berbasis kelompok membutuhkan bibit sebanyak 50-60 ekor dengan skala kepemilikan 2-3 ekor/orang yang dilaksanakan dalam kurun waktu 90-180 hari dengan asumsi penambahan bobot badan yang diharapkan 0,5-0,7 kg, sehingga di akhir masa penggemukan peternak dapat memperoleh keuntungan dengan bobot.



### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Bima

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	<p><b>BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan petani masih rendah baik secara nominal maupun secara relatif dibandingkan dengan sektor lain.</li> <li>2. Usaha pertanian yang ada didominasi dengan ciri skala kecil; modal terbatas; teknologi sederhana; sangat dipengaruhi musim; wilayah pasarnya lokal; umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga; akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah; pasar komoditi pertanian sifatnya mono/oligopsoni sehingga terjadi eksploitasi harga pada petani.</li> <li>3. Kurang memperhatikan aspek keunggulan komparatif yang dimiliki daerah, pembangunan agribisnis yang ada masih belum didasarkan kepada kawasan unggulan.</li> <li>4. Kurang mampu bersaing dipasaran, daya saing produk pertanian yang masih rendah termasuk produk olahan.</li> <li>5. Belum adanya kegiatan usaha pertanian yang berwawasan agroindustri.</li> </ol>	<p><b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif.</li> <li>2. Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air.</li> <li>3. Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal.</li> <li>4. Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas.</li> <li>5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A).</li> <li>6. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.</li> <li>7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan.</li> <li>8. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging.</li> <li>9. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Adanya Penerbitan Payung Hukum (PERDA dll) tentang Penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</li> <li>2. Kurang Tersedianya Anggaran Untuk penyediaan sarana produksi pertanian serta Pengembangan Sumber Daya Lahan dan Air</li> <li>3. Kurang Tersedianya Anggaran untuk menumbuh kembangkan industri pada sektor pertanian</li> <li>4. Kurangnya lembaga penyanggah untuk menstabilkan harga komoditi pertanian seperti LUEP dan LDPM.</li> <li>5. Kurangnya kemitraan dengan pengusaha dibidang pertanian dan peternakan dalam upaya peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan.</li> <li>6. Sistem Usaha Peternakan Yang Masih Bersifat Tradisional (Ekstensif).</li> <li>7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Aparatur.</li> </ol>



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		<p><b>BIDANG PETERNAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.</li> <li>2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.</li> <li>3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.</li> <li>4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional.</li> <li>5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.</li> <li>6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</li> <li>7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</li> <li>8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet.</li> <li>9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.</li> <li>10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.</li> <li>11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan teknologi pasca panen.</li> </ol>	





No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.</li> <li>13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.</li> <li>14. Akses permodalan masih dirasakan sulit.</li> <li>15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.</li> <li>16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi).</li> <li>17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar.</li> <li>18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).</li> <li>19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).</li> <li>20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.</li> <li>21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.</li> </ol>	



### 3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Tabel 7. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Disperta	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p><b>Misi:</b> Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan</p>	<p><b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif.</li> <li>Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air.</li> <li>Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal.</li> <li>Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas.</li> <li>Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A).</li> <li>Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan.</li> <li>Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian</li> <li>Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman</li> <li>Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun</li> <li>Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim</li> <li>Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik.</li> <li>Keengganan masyarakat untuk memelihara/ melaksanakan teknik budidaya secara intensif</li> <li>Sumber pendanaan yang masih minim untuk penyediaan sarana produksi pertanian dan menumbuhkembangkan industrialisasi sektor pertanian</li> <li>Sumber pendanaan yang masih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan beberapa aspek lainnya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani peternak.</li> <li>Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/ tanaman</li> <li>Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok</li> <li>Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.</li> </ol>



		<p>9. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani.</p> <p><b>BIDANG PETERNAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.</li> <li>2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.</li> <li>3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.</li> <li>4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional.</li> <li>5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.</li> <li>6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</li> <li>7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</li> <li>8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet.</li> <li>9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.</li> <li>10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.</li> <li>11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan teknologi pasca panen.</li> </ol>	<p>minim dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan petani</p> <p>9. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.</p>	
--	--	---	---	--



	<ol style="list-style-type: none"><li>12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.</li><li>13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.</li><li>14. Akses permodalan masih dirasakan sulit.</li><li>15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.</li><li>16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi).</li><li>17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar.</li><li>18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).</li><li>19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).</li><li>20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.</li><li>21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.</li></ol>		
--	---	--	--



### 3.3. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Table 8. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar), produksi hortikultura (mangga, bawang merah, kacang panjang, garoso, pisang), produksi peternakan (sapi, kambing, ayam dan itik/bebek) dan produksi perkebunan (jambu mente, tembakau, kelapa);	<b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b> 1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif. 2. Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air. 3. Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal. 4. Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas. 5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A). 6. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah. 7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan. 8. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging.	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian 2. Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman 3. Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun 4. Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim 5. Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik. 6. Keengganan masyarakat untuk memelihara/ melaksanakan teknik budidaya secara intensif 7. Sumber pendanaan yang masih minim untuk penyediaan sarana produksi pertanian dan menumbuhkembangkan industrialisasi sektor pertanian	1. Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan beberapa aspek lainnya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani peternak. 2. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/ tanaman 3. Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok 4. Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.
2.	Meningkatnya penggunaan benih dan bibit unggul bermutu pada tiga komoditi utama pertanian yakni padi, jagung dan kedelai, perkebunan serta peternakan;			
3.	Meningkatnya pusat penangkaran benih tanaman pangan, perkebunan dan pembibitan ternak;			
4.	Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam budidaya tanaman;			



No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
6.	Tersedianya pupuk bersubsidi baik organik maupun pupuk anorganik untuk memenuhi kebutuhan tanaman;	9. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani.	8. Sumber pendanaan yang masih minim dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan petani	
7.	Meningkatnya jumlah dan kualitas pelaku usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;	<b>BIDANG PETERNAKAN</b> 1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah. 2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.	9. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.	
8.	Menurunnya tingkat serangan Organisma Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan;	3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.		
9.	Meningkatnya produksi daging, telur dan hasil olahan;	4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional.		
11.	Berkurangnya penyebaran penyakit menular hewan;	5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.		
12.	Meningkatnya populasi dan kualitas genetik ternak (ternak besar, kecil dan unggas);	6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.		
13.	Meningkatnya produktivitas lahan kering melalui optimalisasi lahan dan perbaikan sumber daya air;	7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi). 8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet. 9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.		



No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
14.	Terpeliharanya sarana dan prasarana irigasi melalui kegiatan pengolahan lahan dan air (PLA);	10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.		
15.	Tersedianya produk-produk tanaman pangan, perkebunan dan peternakan unggulan daerah;	11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan teknologi pasca panen.		
16.	Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik air tanah maupun air permukaan untuk tanaman dan peternakan;  Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi pedesaan.	12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan. 13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak. 14. Akses permodalan masih dirasakan sulit. 15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata. 16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi). 17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar. 18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli). 19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota,		



No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
		pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi). 20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang. 21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.		

### 3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tabel 9. Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Kota Bima sebagai sentra produksi komoditi tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta produk olahan yang berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.	<b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b> 1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif. 2. Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air. 3. Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal. 4. Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian 2. Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman 3. Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun	1. Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan beberapa aspek lainnya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani peternak.





No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas.</p> <p>5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A).</p> <p>6. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.</p> <p>7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan.</p> <p>8. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging.</p> <p>9. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani.</p> <p><b>BIDANG PETERNAKAN</b></p> <p>1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.</p> <p>2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.</p> <p>3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.</p>	<p>4. Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim</p> <p>5. Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik.</p> <p>6. Keengganan masyarakat untuk memelihara/ melaksanakan teknik budidaya secara intensif</p> <p>7. Sumber pendanaan yang masih minim untuk penyediaan sarana produksi pertanian dan menumbuhkembangkan industriliasiasi sektor pertanian</p> <p>8. Sumber pendanaan yang masih minim dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan petani</p> <p>9. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.</p>	<p>2. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/ tanaman</p> <p>3. Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok</p> <p>4. Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.</p>



No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional.</li> <li>5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.</li> <li>6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</li> <li>7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</li> <li>8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet.</li> <li>9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.</li> <li>10. Kemampuan transformasi teknologi (<i>breeding</i>, penyakit) kurang.</li> <li>11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan teknologi pasca panen.</li> <li>12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.</li> <li>13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas</li> </ol>		



No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>dalam menentukan penjualan ternak.</p> <p>14. Akses permodalan masih dirasakan sulit.</p> <p>15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.</p> <p>16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi).</p> <p>17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar.</p> <p>18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).</p> <p>19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).</p> <p>20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.</p> <p>21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.</p>		



Tabel 10. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan lahan pertanian untuk budidaya komoditas hortikultura.</li> <li>Pengembangan pertanian lahan basah untuk peningkatan ketahanan pangan.</li> <li>Membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis.</li> <li>Penataan Kawasan lindung dan kawasan hutan produksi di Kota Bima</li> </ol>	<p><b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif.</li> <li>Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air.</li> <li>Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal.</li> <li>Permodalan petani dalam mendukung usaha taninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas.</li> <li>Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani (Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, P3A).</li> <li>Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan.</li> <li>Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek higienis dan packaging.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mempertahankan status lahan pertanian</li> <li>Maraknya kegiatan penebangan liar pohon/tanaman</li> <li>Masyarakat petani peternak melakukan pola usaha budidaya menurut kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun</li> <li>Pemanfaatan lahan pekarangan yang minim</li> <li>Petani peternak lebih dominan menjual ternaknya yang berkualitas baik.</li> <li>Keengganan masyarakat untuk memelihara/ melaksanakan teknik budidaya secara intensif</li> <li>Sumber pendanaan yang masih minim untuk penyediaan sarana produksi pertanian dan menumbuhkembangkan industrialisasi sektor pertanian</li> <li>Sumber pendanaan yang masih minim dalam upaya peningkatan kualitas dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk melahirkan payung hukum (PERDA, dll) tentang status lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan beberapa aspek lainnya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani peternak.</li> <li>Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/ tanaman</li> <li>Adanya partisipasi penyuluh dalam pembinaan kelompok</li> <li>Adanya ketergantungan pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan pada hasil yang diproduksi oleh petani peternak.</li> </ol>



No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>9. Masih tingginya fluktuasi harga produksi komoditi tanaman pertanian di tingkat petani.</p> <p><b>BIDANG PETERNAKAN</b></p> <p>1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.</p> <p>2. Belum maksimalnya kebijakan sistem pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.</p> <p>3. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.</p> <p>4. Perlunya peningkatan dukungan kebijakan Rumpun Hijau dalam mendukung Propinsi NTB sebagai salah satu pusat penyedia ternak potong nasional.</p> <p>5. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.</p> <p>6. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.</p> <p>7. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).</p> <p>8. Angka kelahiran ternak masih rendah (44,33% dari induk produktif) dan angka kematian anak sebesar 0,59% dari jumlah pedet.</p> <p>9. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.</p> <p>10. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.</p>	<p>kapasitas sumber daya manusia aparatur dan petani</p> <p>9. Mental pengusaha yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang hanya menunggu hasil dan tidak peduli terhadap proses produksi.</p>	



No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>11. Kurangnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan tehnologi pasca panen.</p> <p>12. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.</p> <p>13. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.</p> <p>14. Akses permodalan masih dirasakan sulit.</p> <p>15. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.</p> <p>16. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awearness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging, razia daging legal dan ilegal dan regulasi).</p> <p>17. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar.</p> <p>18. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).</p> <p>19. Belum semua kelompok memiliki aturan/ regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal</p>		



No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Disperta Kota Bima	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		ronda dan sanksi). 20. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang. 21. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produksi, hanya menunggu hasil.		



### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
2. Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam;
3. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumber daya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian;
4. Kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran;
5. Semakin menurunnya produksi dan kualitas tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan/empon-empon);
6. Semakin rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi, Kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar;
7. Kurangnya penerapan industrialisasi pengolahan produk hasil pertanian;
8. Belum adanya kegiatan usaha pertanian yang berwawasan agroindustri.
9. Pemasaran hasil produk yang masih sangat fluktuatif;
10. Sering terjadi kendala dalam pemasaran produk olahan hasil pertanian;
11. Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian;
12. Kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak yang perlu terus ditingkatkan.





# BAB 4

## TUJUAN DAN SASARAN

---

Visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2024–2026 adalah “**Mewujudkan Kota Bima Yang SEJAHTERA, MAJU dan MANDIRI pada Tahun 2028**”, dan dalam menunjang pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan misi *“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan”*.

Dengan rumusan visi tersebut di atas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan (2024–2026) diharapkan kondisi pembangunan pertanian di Kota Bima mengalami perubahan dan lompatan secara signifikan yang diindikasikan oleh 2 (dua) indikator keberhasilan utama, yaitu :

1. Tercapainya swasembada dan swesembada berkelanjutan yang ditandai dengan makin meningkatnya produktivitas lahan dan kualitas produksi komoditi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
2. Masyarakat yang maju dan mandiri, ditandai dengan adanya kemajuan dalam hal tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan pendapatan petani dan pelaku usaha pertanian serta ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai.

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima adalah menggambarkan rumusan situasi yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Bima selama 3 tahun ke depan, adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima selama 3 tahun ke depan dapat disajikan pada tabel 11 dibawah ini :



Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima

**Misi** : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	PDRB Sektor Pertanian (Juta Rupiah)	684.231,01	Meningkatnya Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	5,57	6,92	8,27		
				Meningkatnya Produksi Sub Sektor Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	2,24	2,67	2,87		
				Meningkatnya Produksi Sub Sektor Peternakan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	1,65	1,85	2,05		

Catatan : Produk Domestik Regional Bruto Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (BPS Kota Bima)



# BAB 5

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kota Bima**

<b>VISI</b> : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri			
<b>MISI</b> : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	1. Penguatan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, florikultura dan biofarmaka	1. Peningkatan luas tanam tanaman pangan, hortikultura, florikultura dan biofarmaka ; 2. Pengembangan perbibitan/perbenihan 3. Peningkatan produktivitas
		2. Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan teknologi;	1. Perlindungan petani dan akses permodalan; 2. Peningkatan SDM petani
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;	1. Penerapan teknologi panen dan pasca panen; 2. Penerapan standar mutu hasil pertanian melalui penerapan GAP, GHP, registrasi lahan; 3. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan melalui integrasi kawasan budidaya dengan sentra pengolahan;
		4. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani	1. Penerapan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			2. Revitalisasi sarana dan kelembagaan pasar produk pertanian (pasar tani, sub terminal agribisnis) melalui promosi produk pertanian, stabilisasi harga, pengembangan jaringan pasar yang terintegrasi, pelayanan informasi pasar dan kemitraan
	Meningkatnya Produksi Perkebunan	1. Penguatan sentra produksi komoditi perkebunan	1. Peningkatan luas tanam komoditi perkebunan; 2. Pengembangan perbibitan/perbenihan 3. Peningkatan produktivitas
		2. Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan teknologi;	1. Perlindungan petani dan akses permodalan; 2. Peningkatan SDM petani
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;	1. Penerapan teknologi panen dan pasca panen; 2. Penerapan standar mutu hasil pertanian melalui penerapan GAP, GHP, registrasi lahan; 3. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan melalui integrasi kawasan budidaya dengan sentra pengolahan;
		4. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani	1. Penerapan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu 2. Promosi produk perkebunan, stabilisasi harga, pengembangan jaringan pasar yang terintegrasi, pelayanan informasi pasar dan kemitraan
	Meningkatnya Produksi Peternakan	Menumbuhkembangkan sentra-sentra produksi peternakan;	a. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri);



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri);</li> <li>b. Peningkatan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan;</li> <li>c. Revitalisasi/optimalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;</li> <li>d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan;</li> <li>f. Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi penambahan komoditas;</li> <li>g. Penetapan dan penumbuhkembangan kawasan/sentra peternakan berdasarkan potensinya</li> <li>h. Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan</li> <li>i. Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan akses terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan</li> </ul>



# BAB 6

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima dalam kurun waktu tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024–2026 mengacu pada VISI dan MISI Pemerintah Kota Bima dan RPJMD Kota Bima dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Rencana Tata Ruang dan Isu-Isu Strategis yang berkembang.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:



- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 1.2.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.2.8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 1.3.2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - 1.3.3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 1.3.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1.4.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - 1.4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.4.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - 1.4.4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - 1.4.5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.4.6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.5.6. Penyediaan Bahan/Material
  - 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 1.5.9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - 1.5.10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.5.11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.5.12. Pengadaan Mebel
  - 1.5.13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.14. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 1.5.15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.5.16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 1.5.17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.5.18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.5.19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, dengan kegiatan:
- 2.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan
    - 2.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
    - 2.1.2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian





- 2.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - 2.2.1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
  - 2.2.2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- 2.3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - 2.3.1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
  - 2.3.2. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- 2.4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, dengan kegiatan:
  - 2.4.1. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- 2.5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - 2.5.1. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
  - 2.5.2. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
  - 2.5.3. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, dengan kegiatan:
  - 3.1. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
    - 3.1.1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan



- 3.1.2. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
- 3.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
- 3.1.4. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
- 3.1.5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- 3.1.6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- 3.1.7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 3.1.8. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- 3.1.9. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
- 3.1.10. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
- 3.1.11. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
- 3.1.12. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
- 3.1.13. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 3.2. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
  - 3.2.1. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
  - 3.2.2. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
  - 4.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:



- 4.1.1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- 4.1.2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.3. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
- 4.2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - 4.2.1. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
  - 4.2.2. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4.3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - 4.3.1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
  - 4.3.2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 4.4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan:
  - 4.4.1. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
  - 4.4.2. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN, dengan kegiatan:
  - 5.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 5.1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
    - 5.1.2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
    - 5.1.3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan



- 5.1.4. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN, dengan kegiatan:
  - 6.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - 6.1.1. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
    - 6.1.2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
  - 6.2. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, dengan sub kegiatan:
    - 6.2.1. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, dengan kegiatan:
  - 7.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
    - 7.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
    - 7.1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
    - 7.1.3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
    - 7.1.4. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
    - 7.1.5. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024–2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	
Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	100%	100%	3.276.238.875	100%	3.440.050.819	100%	3.612.053.360	100%
		<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Jumlah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian</i>	<i>14 Laporan</i>	<i>14 Laporan</i>	<i>2.927.985.475</i>	<i>14 Laporan</i>	<i>3.074.384.749</i>	<i>14 Laporan</i>	<i>3.228.103.986</i>	<i>42 laporan</i>
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	4 Laporan	4 Laporan	358.687.940	4 Laporan	376.622.337	4 Laporan	395.453.454	12 laporan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	10 Laporan	10 Laporan	2.569.297.535	12 Laporan	2.697.762.412	12 Laporan	2.832.650.532	34 laporan
		<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pengawasan peredaran dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>13.059.700</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>13.712.685</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>14.398.319</i>	



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	4 Laporan	4 Laporan	6.979.200	4 Laporan	7.328.160	4 Laporan	7.694.568	12 laporan
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	4 Laporan	4 Laporan	6.080.500	4 Laporan	6.384.525	4 Laporan	6.703.751	12 laporan
		<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>28.995.700</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>30.445.485</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>31.967.759</i>	<i>12 laoran</i>
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	10000 ekor	10000 ekor	1.080.000	10000 ekor	1.134.000	11000 ekor	1.190.700	31000 ekor
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan	4 Laporan	4 Laporan	27.915.700	4 Laporan	29.311.485	4 Laporan	30.777.059	12 laporan
		<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak</i>	<i>1093 ekor</i>	<i>1093 ekor</i>	<i>306.198.000</i>	<i>1300 ekor</i>	<i>321.507.900</i>	<i>1500 ekor</i>	<i>337.583.295</i>	<i>3839 ekor</i>



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	
		<i>Lain</i>									
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota Lain	1093 ekor	1093 ekor	306.198.000	1300 ekor	321.507.900	1500 ekor	337.583.295	3839 ekor
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	60%	60%	2.695.800.800	70%	2.830.590.840	75%	2.972.120.382	75%
		<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara</i>	<i>25 Unit</i>	<i>25 Unit</i>	<i>2.695.800.800</i>	<i>30 unit</i>	<i>2.830.590.840</i>	<i>35 unit</i>	<i>2.972.120.382</i>	<i>90 unit</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	4 Laporan	4 Laporan	20.800.800	4 Laporan	21.840.840	4 Laporan	22.932.882	12 laporan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun/ direhabilitasi/dipelihara	5 unit	5 unit	550.000.000	10 unit	577.500.000	10 unit	606.375.000	25 unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah jaringan embung pertanian terbangun/ direhabilitasi/dipelihara	3 unit	3 unit	300.000.000	3 unit	315.000.000	3 unit	330.750.000	9 unit



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jaringan Jalan Usaha Tani terbangun/direhabilitasi/dipelihara	5 unit	5 unit	625.000.000	5 unit	656.250.000	5 unit	689.062.500	15 unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	1 unit	500.000.000	1 unit	525.000.000	1 unit	551.250.000	1 unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang terbangun/direhabilitasi/dipelihara	1 unit	1 unit	200.000.000	1 unit	210.000.000	1 unit	220.500.000	3 unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	10 unit	10 unit	500.000.000	15 unit	525.000.000	20 unit	551.250.000	45 unit
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS	0,14%	0,14%	254.958.524	0,14%	267.706.450	0,12%	281.091.773	0,12%
		<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan kesehatan hewan dan penanganan wabah penyakit hewan menular</i>	<i>200 ekor</i>	<i>200 ekor</i>	<i>190.660.224</i>	<i>250 ekor</i>	<i>200.193.235</i>	<i>300 ekor</i>	<i>210.202.897</i>	<i>750 ekor</i>





Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penurunan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis yang ditanggulangi	4 Laporan	4 Laporan	176.322.224	4 Laporan	185.138.335	4 Laporan	194.395.252	12 laporan
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas wilayah pembebasan penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang ditangani	4 Laporan	4 Laporan	14.338.000	4 Laporan	15.054.900	4 Laporan	15.807.645	12 laporan
		<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner</i>	<i>150 layanan</i>	<i>150 layanan</i>	<i>10.324.000</i>	<i>200 layanan</i>	<i>10.840.200</i>	<i>200 layanan</i>	<i>11.382.210</i>	<i>550 layanan</i>
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang diberikan	150 layanan	150 layanan	10.324.000	200 layanan	10.840.200	200 layanan	11.382.210	550 layanan
		<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Jumlah pengawasaan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</i>	<i>25 Unit Usaha</i>	<i>25 Unit Usaha</i>	<i>53.974.300</i>	<i>15 unit usaha</i>	<i>56.673.015</i>	<i>20 unit usaha</i>	<i>59.506.666</i>	<i>60 unit usaha</i>
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	15 unit usaha	15 unit usaha	15.450.700	15 unit usaha	16.223.235	20 unit usaha	17.034.397	50 unit usaha
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	4 Laporan	4 Laporan	38.523.600	4 Laporan	40.449.780	4 Laporan	42.472.269	12 laporan



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	
		Hewan									
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan berkurangnya dampak bencana pertanian	35%	35%	218.100.500	45%	229.005.525	50%	240.455.801	50%
		<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</i>	90%	90%	218.100.500	90%	229.005.525	90%	240.455.801	90%
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	90%	90%	83.234.700	90%	87.396.435	92%	91.766.257	92%
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani	200 Ha	200 Ha	134.865.800	250 Ha	141.609.090	300 Ha	148.689.545	750 Ha
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	100%	100%	48.236.000	100%	50.647.800	100%	53.180.190	100%
		<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian</i>	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	48.236.000	15 Pelaku Usaha	50.647.800	20 Pelaku Usaha	53.180.190	50 pelaku usaha



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	15 Dokumen	15 Dokumen	16.455.800	15 Dokumen	17.278.590	15 Dokumen	18.142.520	45 dokumen
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	4 Laporan	31.780.200	4 Laporan	33.369.210	4 Laporan	35.037.671	12 laporan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peningkatan SDM pertanian	20%	20%	218.044.245	20%	228.946.457	25%	240.393.780	25%
		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian</i>	<i>62 Unit</i>	<i>62 Unit</i>	<i>218.044.245</i>	<i>62 Unit</i>	<i>228.946.457</i>	<i>77 unit</i>	<i>240.393.780</i>	<i>77 unit</i>
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Unit	4 Unit	47.714.000	4 Unit	50.099.700	4 Unit	52.604.685	4 Unit
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Unit	50 Unit	63.333.200	50 Unit	66.499.860	65 Unit	69.824.853	65 Unit
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	4 Unit	4 Unit	33.097.200	4 Unit	34.752.060	4 Unit	36.489.663	4 Unit



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota yang terbentuk dan beroperasi	4 Unit	4 Unit	73.899.845	4 Unit	77.594.837	4 Unit	81.474.579	4 Unit
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>						<b>6.711.378.944</b>		<b>7.046.947.891</b>		<b>7.399.295.286</b>	



# BAB 7

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 14. Indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Bima yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2024–2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 ( 2024 )	Tahun 1 ( 2025 )	Tahun 2 ( 2026 )			
1	2	3	4	5			9
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,28	1,58	2,32			2,32
2.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	1,06	1,36	1,45			1,45
3.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	1,95	2,15	2,53			2,53



# BAB 8

# PENUTUP

---

Rencana Strategik Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024–2026, akan dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif semua pihak, kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan disemua tingkatan serta terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kota Bima, 5 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas,

**M. ADZAN SABIL, SP.**  
NIP. 196809052003121009